

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1987, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Afifah, Ratna Nurul, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Fauzan & Munir, 1997, *Fair Trial Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Adil dan Tidak Memihak*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Ali, Zainudin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anton, F Susanto & Jajang, 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung: Makna Hermeneutis Keyakinan Hakim*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bagong, Suyanto, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Budiarto, Miriam, 1991, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- David, Wahyudi & Aurino R A Djamaris, 2018, *Metode Statistik Untuk Ilmu dan Teknologi Pangan*, Penerbitan Universitas Bakrie, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Inggrit Ifani, M. Fauzan Azim, Khairul Fahmi, Ismail Hasani, 2016, *Fair Trial Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Indonesia*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
- Farkhani dan Evi Ariyani, 2016, *Hukum Dan Wajah Hakim Dalam Dinamika Hukum Acara*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Komisi Yudisial, 2014, *Kualitas Hakim dalam Putusan: Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia peradilan, Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustofa, Wildan Suyuti, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1967, *Hukum Atjara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santiago, Faisal, 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung: Mahkamah Agung Sebagai Benteng Terakhir (Peradilan) Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Seen, Peter R., 1971, *Social Science and Method*, Holbronk, Boston.
- Simorangkir, J.C.T., 1980, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soebekti, R., 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramiita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soesilo, R., 1985, *Tehknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan (menurut KUHAP)*, Politera, Bogor.
- Sutiyoso, Bambang & Sri Hastuti Hapsari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Hakim di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Syahuri, Taufiqurrihman, 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung: Mahkamah Agung yang Kredibel Sesuai Konstitusi*, Rajawali pers, Jakarta.

Takariawan, H. Agus, 2019, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Penerbit Pustaka, Reka Cipta, Bandung.

Usaman, Moh. Uzer Usman, 2006, *Menjadi Guru Profesional*, PT. Mancana Jaya Cemerlang, Bandung.

B. Jurnal

Atmadja, Dewa Gede, “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018.

Budiyono, Tri, “Eksaminasi Putusan Pengadilan (Mengembangkan Diskursus Keadilan, dari Ruang Pengadilan ke Ruang Perkuliahan)”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, April 2008.

Cardidi, Jajang, “Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim Dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana”, *E-Journal Graduate Unpar*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Humam Mabruri dan Reza Irfandi, “Analisis Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Yang Didasarkan Kepada Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi Dibawah Umur Yang Dibacakan Penuntut Umum Di Persidangan Perkara Pencurian”, *Jurnal Verstek*, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 4, No. 1, 2016.

Leba, Efrem Luxiano Lado, “Keyakinan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup Untuk Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana KDRT”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Lumbanraja, Anggita Doramia, “Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, Juli 2019.

Mulyadi, Lilik, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, Maret 2015.

Sari, Rikha Diah, “Pertanggungjawaban Hakim Atas Tindakan “Abuse of Justice” Menurut Sistem Hukum Indonesia”, *Perspektif*, Vol. 25, No. 3, September 2020.

Wantu, Fence M., “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012.

C. Penulisan Hukum

Adnan, Ahmad Wirawan, 2016, *Penerapan Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Stelsel) Dalam Sidang Peradilan Pidana Pembunuhan. (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

K. M. Mukhlasir R.S., 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Akbar, Muhammad Fatahillah, “Menimbang Bukti Kecurangan Pemilu”, <https://kolom.tempo.co/read/1215984/menimbang-bukti-kecurangan-pemilu/full&view=ok>, diakses pada 04 Desember 2021.

Ali, “Menggagas Judicial Liability di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggagas-ijudicial-liability-di-indonesia-lt4bec1bd8da29d>, diakses tanggal 26 Oktober 2021.

Aries, Albert, “Bagaimana Kekuatan Pembuktian Sidik Jari”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-kekuatan-pembuktian-sidik-jari-lt526508d141dd9>, diakses pada 05 maret 2022.

Komisi Yudisial, “Pembenahan Dunia Peradilan Berfokus pada *Judicial Accountability*”, https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/946/pembenahan-dunia-peradilan-berfokus-pada-judicial-accountability, diakses pada 18 Maret 2022.

Michael Berens dan John Shiffman, “Thousands of U.S. judges who broke laws or oaths remained on the bench”, <https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-judges-misconduct/>, diakses pada 10 Desember 2021.

Salmande, Ali, “Hakim Bisa Dipidana Bila Salah Memutus”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-bisa-dipidana-bila-salah-memutus-lt4f8c19e7d75c6>, diakses pada 10 Februari 2022.

E. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang: Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 perihal Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976 perihal Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No.33 K/MIL/2009 perihal Kasasi perkara Muhamad Nurhadi, 24 Maret 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/P/HUM/2011 perihal Uji Materiil Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 09 Januari 2012.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015 perihal Peninjauan Kembali perkara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, 19 Januari 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1V/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 16 Agustus 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 02 Agustus 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26 Maret 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Oktober 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Republik Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Oktober 2015.